

BAB II

ORGANISASI ISLAM HTI DAN MMI

A. Sejarah Hizbut Tahrir Indonesia

1. Berdirinya Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir atau Hizb ut-Tahrir (Arab: حزب التحرير Inggris: *Party of Liberation*; Indonesia: Partai Pembebasan) awalnya bernama Partai Pembebasan Islam (*hizb al-tahrir al-islami*)¹. Hizbut Tahrir didirikan pada tahun 1953 M/1372 H oleh Syaikh Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani, yaitu seorang Qadhi pada mahkamah *Isti'naf* (Mahkamah Agung) di al-Quds kelahiran Ijzim, Haifa, Palestina, dan salumnus uiversitas *al Azhar* dan *Dar al-“ulum*, Kairo Mesir² disebuah Mahkamah Banding Yerusalem, di daerah Baitul Maqdis, serta seorang politisi ulung. Taqiyuddin an-Nabhani berasal dari sebuah “keluarga ilmu”, karena kedua orang tua beliau adalah ahli syariah Islam (faqih). Selain itu, kakek buyutnya, yakni Syaikh Yusuf bin Hasan bin Muhammad an-Nabhani as-Syafi'iy, Abu Mahasin, adalah seorang ulama, penyair dan salah seorang hakim pada masa Daulah Khilafah.³

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Hizbut_Tahrir (07 Juni 2014).

² Khamami Zada, Arif R. Arafah, *Diskursus Politik Islam* (Jakarta: LSIP, 2013), 82.

³ Tim Hizbut Tahrir, *Manifesto Hizbut tahrir untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam* (Jakarta: HTI Press, 2009), 17.

Hizbut Tahrir bukanlah sebuah organisasi kerohanian, melainkan merupakan organisasi politik yang bermaksud untuk membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang sangat parah, membebaskan umat Islam dari ide-ide, sistem perundang-undangan, dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan mereka dari cengkeraman dominasi dan pengaruh negara-negara Barat. Selain itu kemunculan Hizbut Tahrir juga bermaksud untuk membangun kembali Daulah Islamiyah di muka bumi, sehingga urusan pemerintahan dapat dijalankan kembali sesuai dengan apa yang diturunkan Allah.⁴

Semenjak terjadinya perang dunia I dan II, keadaan yang semula hidup dalam system dan kultur Islam mengalami perubahan yang sangat signifikan dengan adanya aksi pendudukan negara-negara Barat, mulai dari Jazirah Arab, Afrika dan kawasan Asia tenggara. Pendudukan ini tidak saja mengambil alih kekuasaan, akan tetapi juga berbagai upaya negara Barat untuk meruntuhkan simbol kekuasaan kaum Muslim. Hal ini dibuktikan dengan semakin gencarnya negara-negara Barat dalam melancarkan paham dan doktrin nasionalisme.⁵

Untuk merespon hegemoni Barat itulah lahir berbagai gerakan-gerakan Islam yang menamakan diriya sebagai kelompok atau partai. Namun munculnya kelompok maupun partai-partai ini sangat

⁴ Tim Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir* (Bogor: Thariqul Izzah, 2007), 4.

⁵ *Ibid.*, 9.

disayangkan, karena masih sangat mudah dipatahkan oleh Barat, sehingga pergerakannya tidak bisa optimal.

Berangkat dari perjuangan ideologis dan berbekal pengalaman kegagalan dari sejumlah gerakan Islam, muncullah keinginan sebagian ulama yang dipelopori oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani untuk mendirikan partai. Hizbut Tahrir sebagai gerakan yang meluruskan dan bertujuan untuk menegakkan kembali kejayaan Islam dengan menegakkan kembali *khalifah Islamiyah*⁶, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Q.S. Ali Imron ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S Ali Imron:3:104)⁷

Selain itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Taqiyuddin An-Nabhani bahwasanya berdirinya Hizbut tahrir disebabkan oleh beberapa hal:

- a. Bahwasanya umat Islam mempelajari Islam dengan cara yang bertentangan dengan metoda kajian yang telah digariskan Islam. Lain

⁶ Tim Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir*, 4.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 63.

dari itu menurut Taqiyuddin banyak umat Islam yang keliru memahami firman Allah Swt⁸:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: Tidak patut orang-orang mukmin keluar semuanya. Tetapi alangkah baiknya jika keluar sebagian (saja) dari tiap-tiap golongan dari mereka, supaya mereka menerima pelajaran tentang agama, dan untuk mereka ingatkan pada kaumnya apabila mereka telah kembali kepada mereka, agar supaya mereka bisa hati-hati. (TQS. At-Taubah:9: 122).⁹

- b. Bahwasanya dunia Barat yang dengki dan membenci Islam dan kaum Muslim terus menerus menyerang agama Islam. Di satu sisi mereka mencela Islam dengan cara mengada-adakan sesuatu yang tidak ada dalam Islam, sementara di sisi lain mereka menjelekjelekkan sebagian hukum-hukum Islam, padahal semuanya adalah hukum-hukum yang tidak diragukan lagi kebenarannya dalam memecahkan masalah dan persoalan hidup.

⁸ Ayat ini mereka tafsirkan bahwa hendaklah dari setiap kelompok masyarakat ada segolongan orang yang mempelajari ilmu agama, kemudian mereka kembali untuk mengajarkan ilmu tersebut kepada kaumnya. Penafsiran seperti ini telah menjadikan usaha untuk mempelajari agama itu hukumnya *farđu kifayah*. Dengan demikian jelas, mereka telah menyalahi hukum syara', sekaligus menyalahi makna ayat itu sendiri. Menurut hukum syara', setiap muslim yang baligh dan berakal wajib hukumnya memahami agama, terutama perkara-perkara yang dibutuhkan dalam kehidupannya, karena ia diperintahkan untuk menyesuaikan seluruh amal

⁹ Menteri Agama, *al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Al-Quran Raja Fahd, 1971), 301.

c. Sebagai akibat menyusutnya Daulah Islamiyah karena banyaknya negeri-negeri Islam yang melepaskan diri lalu tunduk kepada pemerintahan kufur, apalagi disusul dengan runtuh dan lenyapnya Daulah Islamiyah, maka terciptalah dalam benak kaum Muslim gambaran yang memustahilkan terwujudnya kembali Daulah Islamiyah berikut terlaksananya kembali hukum Islam sebagai satu-satunya hukum yang harus diterapkan. Inilah yang mengakibatkan mereka bersedia menerima begitu saja hukum lain yang bukan berasal dari Allah Swt.¹⁰

Atas dasar inilah Hizbut Tahrir berdiri. Hizbut Tahrir berusaha untuk melangsungkan kembali kehidupan Islam di kawasan negeri-negeri Arab. Dari sanalah tujuan untuk melangsungkan kehidupan Islam di seluruh dunia Islam secara alami akan tercapai, yaitu dengan jalan mendirikan Daulah Islamiyah di satu atau beberapa wilayah sebagai titik sentral Islam dan sebagai benih berdirinya Daulah Islamiyah yang besar yang akan mengembalikan kehidupan Islam, dengan menerapkan Islam secara sempurna di seluruh negeri-negeri Islam, serta mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia.

Sepeninggal Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, tonggak kepemimpinan Hizbut Tahrir digantikan oleh Syekh Abdul Qadim Zallum. Pandangan-pandangan kedua tokoh dapat dilihat dari buku-buku

¹⁰ Abdullah, *Mafahim Hizbut Tahrir* (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2001), 13-20.

yang sudah diterbutkan oleh Hizbut Tahrir melalui HTI Press. Sepeninggal kepemimpinan kedua pada tahun 2003, Hizbut Tahrir dipimpin oleh Syekh A. Abu Rostah secara Internasional hingga sekarang ini.

2. Masuknya Hizbut Tahrir ke Indonesia

Masuknya Hizbut Tahrir ke Indonesia diperkirakan pada awal tahun 1980-an, disaat Abdurrahman al-Baghdadi, seorang warga negara Australia keturunan Arab, atas bantuan K.H. Abdullah bin Nuh, pendiri pesantren Al-Ghazali Bogor, mengajaknya tinggal di Indonesia, mulai melakukan safari dakwah dan memperkenalkan Hizbut Tahrir ke berbagai pesantren dan kampus-kampus Indonesia.

Berawal dari para aktivis masjid kampus Al-Ghifari, IPB Bogor, kemudian dibentuklah sebuah halaqah-halaqah (pengajian-pengajian kecil) untuk mengeksplorasi gagasan-gagasan Hizbut Tahrir. Setelah secara bertahap melakukan pengkaderan dan pergerakan “bawah tanah”, saat ini Hizbut Tahrir telah tersebar di 150 kota di seluruh Indonesia. Bahkan cabang Hizbut Tahrir telah tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia, termasuk di Papua dan bahkan “pulau dewa” Bali.

Menjelang pertengahan tahun 1990-an, ide-ide Hizbut Tahrir mulai menyebar ke berbagai lapisan masyarakat, baik melalui dakwah para kader di mesjid, perkantoran, pabrik, dan perumahan, maupun melalui penerbitan buku-buku, bulletin *Al-Islam*, dan majalah bulanan *Al-Wa'ie*,

yang membahas tema-tema khas, yang menjadi acuan dalam berbagai kegiatan diskusi, seminar, dan bahkan aksi unjuk rasa.¹¹

Ketika Indonesia memasuki era reformasi; suatu momentum terbuka luas bagi Hizbut Tahrir untuk melegalkan gerakannya. Gebrakan besar dilakukan Hizbut Tahrir pada tahun 2002 dengan sukses menggelar Konferensi Internasional Khilafah Islamiyah di Senayan Jakarta. Tidak kurang dari 5000 orang menghadiri acara tersebut. Sukses tersebut berlanjut dengan kegiatan aksi demo menentang penyerangan Amerika Serikat terhadap Afghanistan. Gerakan Hizbut Tahrir semakin mengemuka ketika berhasil menggelar *long-march* yang diikuti 12.000 kader dan simpatisan, pada Sidang Tahunan MPR 2002, menuntut penerapan syariat Islam. Kemudian, pada tanggal 29 Februari 2004, Hizbut Tahrir kembali menggelar *long-march* dari Monas ke Bundaran Hotel Indonesia dengan melibatkan 20.000 anggota dengan agenda penegakan syariat Islam dan Khilafah.¹²

Sejak diselenggarakannya konferensi internasional di Istora Senayan pada tahun 2002 yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Hizbut Tahrir Internasional dan Nasional, serta tokoh-tokoh Islam dari organisasi lain, Hizbut Tahrir resmi melakukan aktifitasnya di Indonesia secara terbuka

¹¹Kurniawan Abdullah, “Gerakan Politik Islam Ekstraparlementer: Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia”, (Tesis, UI, tidak dipublikasikan, 2003), 49.

¹² Mengenal “Hizbut Tahrir” di www.hizbut-tahrir.or.id , (8 Juni 2014)

seperti bisa dilihat dari munculnya organisasi ini dalam konteks Indonesia yang kemudian di kenal dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Lahirnya Hizbut Tahrir di Indonesia langsung memproklamirkan diri sebagai partai politik yang berideologi Islam, namun menolak bergabung dengan sistem politik yang ada, karena Indonesia menganut sistem politik ciptaan kaum Kafir seperti demokrasi dan sebagainya. Di Indonesia, perkembangan pesat HTI ini bisa dilihat dari kuantitas anggotanya dan intensitas kegiatan HTI di ruang publik, yaitu dalam bentuk pawai, seminar (baik yang berskala internasional, nasional, dan lokal), dialog dan diskusi publik, serta proliferasi media di berbagai daerah di tanah air.

Para tokoh-tokoh Hizbut Tahrir Indonesia banyak yang bertempat tinggal di Bogor sebagai upayanya dalam mensosialisasikan gerakan yang mereka usung. Untuk kepengurusan Hizbut Tahrir Indonesia dalam lingkup nasional, Humas Hizbut Tahrir Indonesia secara resmi dipegang teguh oleh Ismail Yusanto, sedangkan untuk wilayah Jawa Barat dipegang oleh Muhammad Syahabi.¹³

3. Aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia

Seluruh kegiatan yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia adalah kegiatan yang bersifat politik. Dimana mereka memperhatikan urusan masyarakat sesuai dengan hukum-hukum serta pemecahannya secara

¹³ Afadlal, et al, *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2005), 266.

syar'i, karena politik adalah mengurus dan memelihara urusan masyarakat (rakyat) banyak sesuai dengan hukum-hukum Islam dan pemecahan-pemecahannya.

Kegiatan-kegiatan yang bersifat politik ini tampak jelas di dalam mendidik dan membina umat dengan *tsaqafah* (kebudayaan) Islam, meleburnya dengan Islam, membebaskannya dari akidah-akidah yang rusak, pemikiran-pemikiran yang salah, serta dari persepsi yang keliru, yang sekaligus membebaskannya dari pengaruh ide-ide dan pandangan-pandangan yang kufur. Kegiatan politik ini tampak juga dalam aspek pergolakan pemikiran dan dalam perjuangan politiknya.

Adapun pergolakan pemikiran tersebut dapat terlihat dalam penentangannya terhadap ide-ide dan aturan-aturan kufur. Seperti halnya dalam penentangannya terhadap ide yang salah, aqidah-aqidah yang rusak atau pemahaman yang keliru dengan cara menjelaskan kerusakannya, menampakkan kekeliruannya, yang disertai dengan menjelaskan ketentuan hukum Islam dalam masalah tersebut. Adapun perjuangan politiknya, dapat terlihat dari penentangannya terhadap orang-orang kafir Imperialis untuk memerdekan umat dari belenggu kekuasaannya, membebaskan umat dari tekanan dan pengaruhnya, serta mencabut akar-akarnya yang berupa pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi, maupun militer dari seluruh negeri-negeri Islam.

Perjuangan politik ini juga tampak jelas dalam menentang para penguasa, mengungkapkan pengkhianatan dan persekongkolan mereka terhadap umat; melancarkan kritik, kontrol dan koreksi terhadap mereka serta berusaha menggantinya apabila hak-hak umat dilanggar atau tidak menjalankan kewajibannya terhadap umat, begitu halnya bila mereka melalaikan salah satu urusan umat, atau mereka menyalahi hukum-hukum Islam.

Jadi kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia secara keseluruhan adalah kegiatan yang bersifat politik, baik sebelum maupun sesudah mengambil alih kegiatan diluar hukum pemerintahan ataupun yang menyangkut pemerintahan. Kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia tidak hanya pada aspek pendidikan. Hizbut Tahrir Indonesia bukan madrasah. Begitu pula seruannya tidak hanya bersifat nasehat-nasehat dan petunjuk-petunjuk. Akan tetapi kegiatannya bersifat politik, dengan cara mengemukakan fikrah-fikrah Islam beserta hukum-hukumnya untuk dilaksanakan, dipikul dan diwujudkan dalam kenyataan hidup dan pemerintahan.

Hizbut Tahrir Indonesia mengemban da'wah Islam agar Islam dapat dilaksanakan dalam kehidupan, sehingga aqidah Islam menjadi dasar negara, dasar konstitusi dan Undang-undang. Karena aqidah Islam adalah aqidah aqliyah (dasar untuk pemikiran) dan aqidah siyasiyah (dasar untuk politik) yang memancarkan aturan yang dapat memecahkan

problema manusia secara keseluruhan, baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial masyarakat dan lain-lain.¹⁴

B. Sejarah Majelis Mujahidin Indonesia

1. Berdirinya Majelis Mujahidin Indonesia

Gerakan Islam yang sedang bangkit pasca lengsernya rezim Orde Baru tela ditandai dengan dua tipe: *Pertama* yaitu struktural denga ditandai maraknya pendirian partai-partai yang berbasis Islam, seperti: Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK), Partai Kebangkitan Umat (PKU), Partai Nadlatul Ummat (PNU), Partai Umat Islam (PUI), Partai Masyumi, serta partai-partai Islam lainnya yang saat itu juga muncul dipermukaan. *Kedua* adalah kultural, yang ditandai dengan mejamurnya gerakan/ormas-ormas Islam, seperti: Front Pembela Islam (FPI), Forum Komunikasi Alussunah wal Jamaah (FKASW) yang kemudian lebih populer dengan sebutan Laskar *Jihad* Ahlussunah wal Jamaah, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tarir Indonesia (HTI), Himpunan Mahasiswa Muslim Antar Kampus, serta Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Bangkitnya ormas-ormas Islam tersebut juga diwarnai dengan berbagai karakter, yaitu Formalistik, militan serta radikal.¹⁵

¹⁴ Anonim, *Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis* (Bogor: Pustaka Thariqah Izzah, 2002), 23-25.

¹⁵ Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergolakan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indoesia* (Jakarta: Teraju, 2002), 3.

Sejauh menyangkut gerakan pembaharuan kontemporer di Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia barangkali bisa disebut sebagai yang terpenting dalam menyuarakan pemberlakuan syariat Islam di Indonesia. Majelis Mujahidin Indonesia atau yang sering kita kenal dengan MMI merupakan sebuah organisasi yang muncul dipermukaan Indonesia akibat adanya keprihatinan sebagian tokoh Islam tentang lemahnya posisi umat Islam dalam ikut membangun Tanah Air. Begitu juga kemunculannya tidak lain juga disebabkan oleh posisi umat Islam yang dalam kenyataannya terus terpinggirkan, lebih-lebih selama Orde Baru memegang kekuasaan pemerintahan. karena itulah, ketika Orde Baru jatuh telah muncul dikalangan umat Islam diskusi-diskusi tentang bagaimana mengangkat citra umat Islam sehingga menjadi umat Islam menjadi *rahmatan lilalamin*.¹⁶

Kelahiran Majelis Mujahidin Indonesia sendiri didasarkan pada tiga alasan : *Pertama*, alasan ideologis, artinya bahwa melaksanakan Syari'ah Islam secara menyeluruh (*kaffah*) adalah kewajiban bagi setiap pribadi muslim, serta menjalankan Syari'ah Islam secara *kaffah* tadi tidak mungkin terlaksana kalau tidak dilakukan secara bersama-sama atau berjama'ah. *Kedua*, alasan historis, yaitu bahwa saat ini umat Islam khususnya di Indonesia tidak memiliki kepemimpinan umat. Selama ini yang ada hanyalah kepemimpinan kelompok seperti kepemimpinan organisasi Islam atau partai

¹⁶ Afadlal, et al, *Islam dan Radikalisme*, 248.

Islam. Padahal Syariat Islam tidak akan pernah bisa tegak jika tidak ada kepemimpinan umatnya. *Ketiga*, alasan kondisional, yaitu bahwa sejak awal era reformasi proses demokratisasi dalam hal ini kebebasan masyarakat untuk berekspresi sedang terjadi. Akan tetapi gerakan-gerakan Islam belum memiliki wadah untuk menjalankan agenda perjuangannya untuk menegakkan Syariat Islam.¹⁷

Keberadaan serta perkembangan Majelis Mujahidin Indonesia yang menghendaki penegakan syari'at Islam di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari seorang tokoh muslim yang kemudian menjadi ketua umum MMI, beliau adalah Abu Bakar Ba'asyir. Seorang tokoh muslim ini dilahirkan pada tanggal 12 Dzulhijjah 1356 H, bertepatan dengan 17 Agustus 1938 di desa Pekunden, Mojoagung Kabupaten Jombang Jawa Timur.¹⁸

Tokoh Islam yang bernama lengkap Abu Bakar bin Abud Baamualim Ba'asyir tersebut menghabiskan masa kanak-kanaknya bersama saudara-saudaranya. Pada usia tujuh tahun Abu Bakar Ba'asyir ditinggal mati oleh ayahnya hingga beliau menjadi yatim piatu pada tahun 1945, dan yang kemudian diasuh oleh ibunya yang bernama Halimah sampai beliau meju jenjang Sekolah Menenga Atas (SMA).

¹⁷ Al Hafni, Abdul Mun'in, Dr., *Ensiklopedia: Golongan, Kelompok, Aliran, Partai dan Gerakan Islam* (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2006), 757.

¹⁸ Irfan S.Awwas, *Dari Penjara ke Meja Hijau: Menelusuri Jejak Dakwa Abu Bakar Ba'asyir*, (Yogyakarta: Wihdah Press, 2003), 39.

Pada tahun 1959, Abu Bakar Ba'asyir melanjutkan pendidikannya di Pesantren Gontor Ponorogo. Selama dipesantren ia banyak berkenala dengan banyak orang serta aktif dalam organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII). Setelah selesai di Pesantren Gontor, beliau melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi dengan mengambil jurusan dakwah Universitas *Al-Irsyad*, Surakarta, yang hingga menjadikannya aktif didalam beberapa organisasi Islam, seperti: Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) selaku sekeretaris tingkat Kecamatan, dan pada tahun 1961, menjadi ketua Pelajar Islam Indonesia (PII) ranting Pesantren Gontor. Selanjutnya, pada tahun 1966 tampil sebagai Ketua LDMI (Lembaga Dakwah Mahasiswa Indonesia) cabang Surakarta. Sampai jabatan yang terakhir yang pernah di pegang dalam organisasi Islam adalah sebagai sekretaris umum pemuda Al Irsyad cabang Solo.¹⁹

Dari berbagai kegiatan-kegiatan serta organisaisi Islam yang telah digeluti itulah hingga pada akhirnya Ba'asyir bersentuhan langsung dengan sejumlah kalangan pemikir-pemikir Islam. Dalam hal ini, setidaknya terdapat lima tokoh muslim yang nantinya menjadi sahabat Abu Bakar Ba'asyir dan sekaligus menjadi tokoh dalam berbagai kegiatan pengajian keagamaan, terutama di daerah Jawa tengah khususnya Solo. Mereka adalah Abdullah Sungkar, Abdullah Baradja, Yoyo Ruswadi, Abdul Qahar Daeng Matese, dan Hasan Basri.

¹⁹ Irfan S. Awwas, *Dari Penjara ke Meja Hijau: Menelusuri Jejak Dakwa Abu Bakar Ba'asyir*, 40.

Dari berbagai pengalaman organisasi yang telah didapatkannya menjadikan Abu Bakar lebih berambisi untuk mendakwahkan Islam melalui media masa, hingga pada akhirnya pada tahun 1967, beliau beserta sahabat karibnya Abdullah Sungkar dan Hasan Basri mendirikan pemancar Radio Dakwah Islamiyah Al Irsyad Broadcasting Commission (ABC), dan dua tahun kemudian mendirikan Radio Dakwah Islamiyah Surakarta (RADIS). Seruan dakwah yang dipancarkan melalui gelombang radio tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat, namun tidak lama kemudian Aparat Intelejen mulai menganggap bahwa dakwah yang disampaikan para Muballigh anti pemerintahan, sudah memasuki wilayah politik, mengkritik penguasa, terutama menyangkut pemberhalaan asas Tunggal Pancasila, hingga rezim Orde Baru melarang RADIS untuk mengudara.

Kejadian tersebut bukan malah menjadikan Abu Bakar untuk berhenti dalam berdakwah, beliau justru mendirikan sebuah Pondok Pesantren Al Mukmin di Ngruki Solo, hingga Pesantren yang dibangunnya terkenal dalam masyarakat sebagai pesantren yang unggul dalam menjaga akidah dan semangat perjuangan untuk menegakkan syariat Islam, sampai Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar menjadi tokoh sentral dalam pendirian pengajian keislaman.

Selain Sebagai muballigh yang memiliki pandangan dan sikap yang keras menolak kebijakan pemerintahan, kedua tokoh tersebut juga terlibat

dalam gerakan yang berjuang dalam upaya pendirian negara Islam. Kritikan tajam mereka lontarkan berkaitan dengan pengesahan asas tunggal, yang dinilainya sebagai suatu bentuk rekayasa dari pihak non Islam untuk menghancurkan institusi Islam di negeri ini. Akibatnya pada tanggal 21 November 1978 beliau ditangkap oleh pemerintahan karena dakwah yang diserukan bertentangan langsung dengan pemerintahan.

Sikap Abu Bakar Ba'asyir terus berlanjut ketika beliau terbebas dari penjara pada tahun 1982. Bersama sahabatnya Abdullah Sungkar, Ba'asyir menjadikan pengajian Islam dipesantrennya sebagai sarana efektif bagi upaya sosialisasi pemikiran politik keagamaan yang keras untuk menentang pemerintahan Orde Baru yang dinilainya tidak berpihak pada Islam. Dalam perkembangannya, pengajian tersebut berubah menjadi gerakan Islam yang bercita-cita mendirikan negara Islam Indonesia, yang kemudian dikenal dengan sebutan gerakan *Usroh*.

Istilah *Usroh* awalnya adalah sebuah kelompok pengajian yang berpusat di Masjid Istiqomah Bandung. Pengajian ini mengajarkan penerapan syariat Islam secara ketat. Dalam perkembangannya nama *Usroh* kemudian digunakan oleh pemerintah untuk mendiskreditkan setiap kelompok pengajian yang dinilai memiliki muatan politik yang menentang terhadap Orde Baru. Bersamaan dengan berjalannya pengajian, sejumlah anggota pengajian menerbitkan tabloid Islam yang diberi nama *ar-Risalah*. Meskipun pada akhirnya tahun 1985, Gerakan

Islam serta Tabloid yang diedarkan diberhentikan dan dilarang oleh pemerintahan, hingga berlanjut ke penangkapan anggota pengajian *Usrah*. Dalam hal ini, Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar tentu menjadi target utama pemerintah, hanya saja keduanya berhasil melarikan diri dan menetap di Malaysia selama lima belas tahun.

Setelah pemerintahan Orde Baru runtuh tahun 1999 beliau kembali pulang ke Indonesia dan kemudian Abu Bakar Ba'asyir bersama sejumlah sahabat seperjuangannya mengadakan sebuah Kongres Mujahidin I yang diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 5-7 Jumadil Ula 1421 H, bertepatan dengan tanggal 5-7 Agustus 2000. Dari kongres Mujahidin pertama tersebut telah mendatangkan berbagai tokoh-tokoh Islam seperti Delier Noer, Ohan Sujana, KH Abdul Qadir Baraja, Muhammad Thalib, Bardan Kindarto, KH Asep Mausul, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dan yang lainnya.

Kongres tersebut bertemakan Penegakan Syari'at Islam, dihadiri oleh lebih dari 1800 peserta dari 24 Propinsi di Indonesia, dan beberapa utusan luar-negeri. Kongres Mujahidin I itulah yang kemudian mengamanatkan kepada sejumlah 32 tokoh Islam Indonesia yang tercatat sebagai *Ahlul Halli wal Aqdi* (AHWA) untuk meneruskan misi

Penegakan Syari'at Islam melalui wadah yang disebut sebagai Majelis Mujahidin.²⁰

Dalam kesempatan tersebut peserta Kongres secara aklamasi memilih Abu Bakar Baasyir sebagai ketua umum MMI. Adapun penasehat organisasi adalah Delier Noer, Muchtar Naim, Mawardi Noor, Ali Yafie, Alawi Muhammad, Amad Syahirul Alim dan A.M Saifudin.²¹

2. Aktivitas Majelis Mujahidin Indonesia

Sebagaimana penuturan Aep Kusnawan, dkk, bahwa aktivitas dakwah dapat dengan menggunakan berbagai cara, antara lain: *Pertama*, khitabah. Adalah media dakwah dalam bentuk pidato. *Kedua*, media cetak. Adalah media dakwah dalam bentuk surat kabar, majalah, tabloid, dan media cetak lainnya. *Ketiga*, radio. Adalah media dakwah dimana seseorang yang ingin menikmatinya menggunakan indera pendengaran. *Keempat*, televisi. Adalah media dakwah dalam bentuk audiovisual. Artinya, disamping melibatkan indera pendengaran, juga dapat menggunakan indera penglihatan untuk menikmatinya. *Kelima*, film. Adalah media dakwah dalam bentuk menyajikan kisah yang diangkat dari kenyataan hidup sehari-hari melalui televisi. Dan *keenam*, media digital.

²⁰ Lihat di <http://majelismujahidin.wordpress.com/2008/01/31/profil-majelis-mujahidin/#more-4> (07 Juni 2014).

²¹ Afadlal, et. al., *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, 249.

Adalah media dakwah dalam bentuk teknologi informasi yang disebut dengan *cyberspace*.²²

Beberapa bentuk aktivitas dakwah yang dilakukan oleh Majelis Mujahidin Indonesia selama ini adalah dalam bentuk mengadakan pengajian di masjid-masjid, berdakwah dengan menggunakan media radio, maupun berdakwah dengan melalui lembaga pendidikan yang dikelolanya bersama dengan teman-temannya, yaitu di pondok pesantren Ngruki. Dengan kata lain, sebenarnya aktivitas dakwah yang dilakukan oleh Abu Bakar Ba'asyir selama ini tidak ada yang bersifat istimewa, sebagaimana penuturan beliau sendiri. Hanya karena materi dakwahnya yang senantiasa menekankan pentingnya menegakkan sya'riat Islam-lah, sehingga aktivitas dakwah yang beliau lakukan selama ini dipandang oleh pemerintah Indonesia (rezim Orde Baru pada waktu itu), mau pun pemerintah luar negeri seperti: Amerika, Australia, Singapura, maupun negara-negara lainnya yang terkesan anti penegakan syari'at Islam, sebagai aktivitas dakwah yang luar biasa, yang tidak lazim dilakukan oleh para da'ipada umumnya, karena dianggap dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah berasaskan Pancasila. Meskipun dengan menggunakan media berupa apapun, ketika

²² Aep Kusnawan, et. al., *Komunikasi dan Penyiaran Islam: Mengembangkan Tabligh Melalui Mimbar, Media Cetak, Radio, Televisi, Film dan Media Digital* (Bandung: Benang Merah Press, 2004), 11-122.

melaksanakan aktivitas dakwahnya, kelompok ini selalu menyampaikan materi yang membahas tentang keharusan menegakkan syari'at Islam.

C. Model Perjuangan Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahidin

Indonesia

Perjuangan penegakan Syari'ah Islam sebagai landasan tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sudah pasti akan menghadapi adanya kelompok didalam tubuh sendiri yang melakukan tindakan-tindakan permusuhan satu dengan yang lain. Dalam menghadapi hal semacam ini, Allah SWT bersama Rasul-Nya telah memberi petunjuk yang jelas. Sebagaimana termaktub dalam Q.S. Al-Hujurat 49 : 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya : Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin bertengkar, damaikanlah mereka. Jika salah satu dari golongan itu berlaku aniaya kepada yang lain, perangilah golongan yang berbuat aniaya sampai ia kembali kepada ketentuan Allah. Jika ia kembali kepada ketentuan Allah, hendaklah engkau damaikan mereka dengan adil dan berbuat adillah kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. (Q.S. Al-Hujurat: 49 : 9).²³

Ayat diatas dengan tegas memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengupayakan perdamaian bila terjadi pertengkaran sesama muslim. Pihak

²³ Menteri Agama, *al-Quran dan Terjemahnya* , 846.

pendamai harus berlaku adil dan memiliki kekuatan untuk memaksa pihak yang berbuat aniaya mematuhi keadilan. Berikut adalah haluan yang diajarkan Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia sebagai jalan untuk memperjuangkan konsep yang di usungnya.

1. Model Perjuangan Hizbut Tahrir Indonesia

Dalam perjuangan dakwahnya, Hizbut Tahrir Indonesia lebih cenderung untuk merubah pemikiran (*mad'u*), yaitu dengan merubah kondisi masyarakat yang rusak menjadi masyarakat Islami. Hal ini dilakukan dengan mengubah ide-ide rusak yang ada menjadi ide-ide Islam, sehingga ide-ide tersebut menjadi opini ditengah-tengah masyarakat, serta menjadi persepsi bagi mereka untuk merealisasikan dan menerapkannya sesuai dengan tuntunan Islam demi terwujudnya masyarakat Islam yang *kaffah*.²⁴

Selain itu, perjuangannya Hizbut Tahrir senantiasa berusaha mengikuti metode atau thariqah dakwah yang ditempuh Rasulullah sejak dari Makkah hingga tegaknya Negara Islam yang pertama di Madinah *al-Munawwarah*. Karena itu, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah, Hizbut Tahrir melakukan perjuangan pemikiran, menentang berbagai paham, pemikiran dan ideologi yang rusak yang menjadi landasan dan dikembangkan oleh ideologi sekularisme, baik yang bercorak Kapitalistik maupun Sosialistik. Hizbut Tahrir dengan tegas

²⁴ Yulia, *Wawancara*, Surabaya, 07 April 2014

mengungkap kesalahan dan kerusakan pemikiran-pemikiran tersebut, serta pertentangannya dengan Islam. Hizbut Tahrir juga menentang dengan keras konsep-konsep yang lahir dari paham sekulerisme seperti Demokrasi, Patriotisme, Sosialisme, dan Kapitalisme atau isme-isme lain.²⁵

Sejalan dengan upaya pemurnian pemikiran tersebut, Hizbut Tahrir juga melakukan perjuangan politik. Karena itu, Hizbut Tahrir mengoreksi, menentang, dan mengungkap kesalahan para penguasa serta mengungkap konspirasi mereka dengan negara-negara penjajah dan kelalaian mereka terhadap Islam dan urusan umat Islam. Dengan demikian, seluruh aktivitas Hizbut Tahrir bersifat politis, karena pengertian politik dalam Islam adalah memelihara urusan dan kepentingan umat dalam arti yang sesungguhnya. Di luar pemahaman tersebut, Islam hanya akan menjadi sekadar nasihat dan ajaran teoritis.

Tujuan dari perjuangan politik Hizbut Tahrir tidak lain untuk membebaskan umat Islam dari berbagai konsep, pemikiran, dan perasaan yang rusak. Hizbut Tahrir berjuang agar pemikiran Islam menjadi kesadaran umum, yang mampu mendorong umat agar bertindak sesuai dengan pemikiran tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Pemikiran Islam itu juga diharapkan mampu

²⁵ Tim Hizbut Tahrir, *Manifesto Hizbut tahrir untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*, 68-69.

mengubah perasaan umat agar mereka mencintai apa pun yang dicintai Allah swt. dan membenci segala yang dibenci Allah swt. Hizbut Tahrir berjuang untuk mewujudkan pola interaksi yang Islami di tengah masyarakat. Dengan demikian, wajar jika Hizbut Tahrir kemudian menjadi representasi umat Islam dalam perjuangan penerapan syariah Islam.

Dari metode dakwah yang digunakan Rasulullah saw, terlihat dengan jelas bahwa adanya perubahan pemikiran dan perasaan masyarakat saja tidaklah cukup untuk menegakkan Islam. Selain perubahan pemikiran dan perasaan masyarakat, juga diperlukan *thalabun nushrah* (upaya penggalangan dukungan) dari pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik. Begitulah, selain menyeru masyarakat secara umum, Hizbut Tahrir secara khusus juga menyerukan kepada para pihak yang memiliki kekuatan politik agar memainkan perannya, yakni menyingkirkan penguasa agen penjajah dan memberikan dukungannya kepada Hizbut Tahrir sehingga kekuasaan Islam bisa ditegakkan.²⁶

Sebagaimana Allah mewajibkan kaum muslim agar selalu terikat dengan hukum-hukum atau aturan-aturan Islam secara menyeluruh, baik yang menyangkut hubungannya dengan Khaliq, yang termasuk perkara akidah dan ibadah, ataupun yang menyangkut hubungan dengan dirinya sendiri, seperti hukum-hukum tentang akhlak, hukum-hukum tentang

²⁶ Ibid., 69-70.

makanan, pakaian, ataupun menyangkut hubungannya dengan sesama manusia, seperti hukum tentang muamalah dan perundang-undangan.

Secara garis besar Hizbut Tahrir menetapkan langkah operasionalnya dalam bentuk tiga tahapan:

- a. Tahap *Tatsqif* (pembinaan dan pengkaderan), pada tahap ini dipusatkan pada pembinaan dan membangun kerangka Hizb, memperbanyak pendukung dan pengikut serta membina para pengikutnya dalam halaqah-halaqah dengan saqafah Hizb dengan terarah dan intensif, sampai pada akhirnya berhasil membentuk partai bersama-sama para pemuda (*syabab*) yang telah menyatu dengan Islam dan menerima pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir. Berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran tersebut dan mengembannya pada masyarakat. setelah Hizbut Tahrir berhasil membentuk kelompok partai dan masyarakat mulai merasakan serta mengenal Hizbut Tahrir serta ide-idenya dan apa yang diserukannya kepada masyarakat, maka Hizbut Tahrir melanjutkan pada tahap kedua.
- b. Tahap *Tafa'ul* (berinteraksi), yaitu berinteraksi dengan masyarakat dan mendorong mereka untuk mengemban dakwah Islam., membentuk kesadaran dan opini umum atas ide-ide dan hukum-hukum Islam yang telah dipilih dan ditetapkan Hizbut Tahrir, hingga dijadikan sebagai pemikiran umat yang akan mendorongnya

untuk berusah diwujudkan dalam realita kehidupan. Bersama-sama dengan Hizb umat melakukan aktivitas untuk mendirikan daulah khilafah, mengangkat seorang khalifah untuk melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Pada tahapan ini Hizb mulai beralih mengajak kepada masyarakat dengan penyampaian yang bersifat kolektif. Pada tahap ini Hizbut Tahrir melakukan aktifitas-aktifitas sebagai berikut:

- 1) *Tsaqafah Murakkazah* (memperbanyak pendukung), dalam hal ini Hizbut Tahrir memperbanyak pengikut atau pendukung dengan membangun sebuah kerangka yang mana nantinya melahirkan pengikut yang berkepribadian Islam serta mampu mengemban dakwah dalam kehidupan melalui pemikiran maupun perjuangana politik.
- 2) *Tsaqafah Jamaiyah*, (menyampaikan ide dan hukum yang sudah di adopsi). Hal ini dilakukan melalui pengajian-pengajian umum di masjid-masjid, atau di balai-balai pertemuan, gedung-gedung dan tempat-tempat umum lainnya. Selain itu Hizb juga melakukan dakwah melalui berbagai media masa, seperti buku-buku dan buletin dengan tujuan mewujudkan kesadaran umat secara umum sekaligus berinteraksi dengan umat.

- 3) *Shira al-Fikri* (pergolakan pemikiran). Untuk menentang kepercayaan, ideologi, aturan dan pemikiran-pemikiran yang kufur. Menentang segala bentuk akidah yang rusak, pemikiran-pemikiran yang kelir, persepsi yang salah dan sesat dengan cara mengungkapkan kepalsuan, kekeliruan dan pertentangan dengan Islam, juga membersihkan umat dari segala bentuk pengaruh dan implikasinya.
- 4) *Kifah as-Siyasi* (perjuangan politik), dalam hal ini Hizbut Tahrir berjuang menghadapi negara-negara kafir imperialis yang menguasai dan mendominasi negeri-negeri Islam, menghadapi segala bentuk penjajahan, baik berupa pemikiran, politik, ekonomi, maupun militer, mengungkap akar dan membongkar kejahatan mereka.

Selain itu menentang para penguasa, membongkar kejahatan mereka, menyampaikan nasehat atau kritik dan mencoba merubah tingkah laku mereka setiap kali mereka merampas hak-hak umat, atau pada saat mereka tidak melaksanakan kewajibannya terhadap umat, atau tatkala melalaikan salah satu urusan umat, ataupun ketika mereka menyalahi hukum-hukum Islam. dan melakukan aktifitas untuk menghapuskan kekuasaan dhalim mereka, kemudian menggantikannya dengan kekuasaan yang merujuk pada sistem hukum Islam, serta mengadopsi

kemaslahatan umat dan melayani seluruh urusannya sesuai dengan hukum-hukum Islam.

- c. *Tahap Istilamu al-Hukum* (penerimaan kekuasaan), dalam tahapan ini bermaksud untuk menerapkan Islam secara praktis dan menyeluruh sekaligus menyebarluaskan risalah Islam ke seluruh dunia.²⁷

Sebagaimana dengan tujuan utama dari Hizbut tahrir adalah mengemban dakwah Islam untuk mengubah kondisi masyarakat yang rusak menjadi masyarakat Islam. hal ini dilakukan dengan mengubah ide-ide rusak menjadi ide-ide Islam, sehingga menjadi sebuah opini umum ditengah masyarakat serta menjadi sebuah persepsi bagi manusia.

Selanjutnya persepsi ini akan mendorong mereka untuk merealisasikan dan menerapkannya sesuai dengan tuntunan dan ajaran yang sesuai dengan Islam.

2. Model Perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia

Model perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia, dibuat setelah melakukan analisa dan kajian mengenai pola dan cara perjuangan yang ditempuh kaum muslimin dewasa ini. Dalam mengembalikan dan menegakkan kembali tatanan kehidupan umat Islam, parpol dan ormas Islam pernah menempuh berbagai langkah antara lain: *Pertama*,

²⁷ Tim Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir*, 38-39.

Perjuangan parlementer sehingga didirikanlah partai-partai yang bersaing dengan partai sekuler dalam upaya mengisi kursi parlemen disuatu negara tempat kaum muslimin hidup. *Kedua*, Gerakan pembinaan aqidah, akhlak, pendidikan, sosial dan ekonomi tanpa mau terlibat sedikitpun dalam urusan perjuangan politik. Gerakan ini lebih mengutamakan pendekatan-pendekatan akhlak individual, keluarga dan masyarakat. Usaha ini dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan formal atau non-formal, pengajian dan kursuskursus keagamaan lainnya. *Ketiga*, Gerakan bersenjata, yaitu melakukan perjuangan bersenjata dan perebutan kekuasaan secara paksa dari penguasa sekuler yang menguasai negeri-negeri Islam. *Keempat*, Gerakan budaya, yaitu membaaur kedalam masyarakat dan sistem kemasyarakatan yang ada sambil memperbaikinya dan menambahkan nilai-nilai Islam, sejauh yang dapat diterima oleh masyarakat. Cara ini lebih condong kepada pola *sinkretisme* dan *talbis* (pembauran antara yang hak dan yang bathil).²⁸

Bahwa jelaslah haluan perjuangan yang dilakukan Majelis Mujahidin Indonesia bersifat aliansi (*tansiq*). Sedangkan *wasilah* dalam mencapai tujuan perjuangannya adalah melalui dakwah dan *jihad fi sabilillah*. Oleh karena itu, Majelis Mujahidin Indonesia menetapkan pola kerja yang benar-benar menyeluruh dan terpadu sehingga dapat

²⁸ Seri Publikasi 2, *Mengenal Majelis Mujahidin Indonesia* (Yogyakarta:Markas Pusat Majelis Mujahidin), 22.

memberikan referensi pola dengan cara perjuangan bagi segenap kelompok umat Islam yang ada. Hal ini sangat diperlukan supaya kita tidak membuang tenaga sia-sia menghadapi dua front, yaitu front musuh Allah SWT dan Rasul-Nya dan front sesama muslim yang muncul karena kecurigaannya.

Majelis Mujaidin Indonesia berkomitmen, bahwa tegaknya syariat Islam dalam lingkup sosial kenegaraan ditandai dengan tiga ciri utama. *Pertama*, bahwa kekuasaan pemerintahan berada dalam tangan kaum muslimin yang memiliki komitmen dalam penegakan syariat Islam. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran pada surat Al-Maidah ayat 5:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya: Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi. (Q.S. Al-Maidah:5:5)²⁹

Kedua, kebijakan pemerintahan harus sesuai dengan syariat Islam sebagai petunjuk yang telah digariskan oleh Allah Swt. Untuk manusia. *Ketiga*, ketika syariat Islam yang dijalankan dengan benar, maka keberadaan umat manusia akan kembali kepada *fitrahnya*. Karena manusia dibangun atas budaya yang sesuai dengan akhlaq islami. Dengan demikian, MMI yakin bahwa penerapan syariat Islam

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 107.

diberbagai lapisan kehidupan merupakan pra syarat mutlak untuk mencapai ketiga ciri yang digambarkan di atas.

Dalam perjuangannya untuk memberlakukan syariat Islam di Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia menerapkan beberapa misi. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada paragraf berikut:

- a. Pendekatan *struktural*. Di dalam pendekatan ini MMI mengupayakan kekuasaan negara dipegang oleh seorang muslim yang jelas komitmennya terhadap Islam dan siap memberlakukan syariat Islam dalam lingkup sosial kenegaraan, sehingga kehidupan bernegara dapat dikelola sesuai dengan ajaran Allah dan Rosulnya.

Dari pendekatan struktural Majelis Mujahidin Indonesia juga memberlakukan dua target.

- 1) Membangun dan melakukan konsolidasi, kristalisasi serta pembinaan pada kekuatan sosial-politik yang ada demi tegaknya syariat Islam. Maka strategi yang dipakai adalah:
 - a) Menyiapkan dan memantapkan konsep pengelolaan pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam dalam semua bidang kehidupan.
 - b) Mengajak secara pro aktif semua kekuatan sosial-politik untuk memahami esensi terjadinya krisis multidimensi di dalam negeri, dan meyakinkan kepada mereka, bahwa

solusi mendasarnya tidak bisa lain kecuali dengan tegaknya syariat Islam dalam lingkup sosial kenegaraan.

c) Menjadikan organisasi MMI sebagai fasilitator semua kekuatan sosial-politik yang sejalan dengan misi-misiya dalam melaksanakan strategi dasarnya untuk menegakkan syariat Islam.

2) Mengembangkan kemampuan tansiq dalam memberi arahan sosial sesuai dengan syariat Islam pada pemerintahan yang sedang berjalan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Abu Bakar selaku Amir MMI, bahwasanya Mujahidin merupakan aliansi umat Islam, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan.³⁰ Dengan kata lain bahwasanya Mujahidin bukan hanya wadah bagi suatu golongan, namun merupakan wadah bagi seluruh golongan umat Islam untuk bersama-sama memikirkan dan memperjuangkan satu misi dan visi memperjuangkan tegaknya syariat Islam.

b. Pendekatan *kultural* yang dilakukan melalui dakwah dan pembinaan akhlak masyarakat, dalam hal ini yang dilakukan adalah dengan cara membentuk sebuah format pembinaan aqidah, akhlak, pendidikan, sosial dan ekonomi, tanpa mau terlibat sedikitpun

³⁰ Abu Bakar Baasyir, "Hadapi Kaum Sekuler Dengan Tegas", Suara Hidayatullah, Majalah, (no. 10 edisi XIII, 2001), 27.

dalam perjuangan partai politik. Gerakan ini lebih mengutamakan pendekatan-pendekatan akhlak individual, keluarga dan masyarakat. usaha-usaha ini dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan formal dan non formal, pengajian dan kursus-kursus keagamaan lainnya.

Selain model-model diatas, sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh M. Aksan Muhladi dengan salah satu tokoh MMI, bahwasanya model perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia secara umum bersifat *akomodatif, reaktif* dan *konfrontatif*.

- a. *Komodatif*, dalam hal ini maksudnya hubungan organisasi MMI dengan organisasi lain dapat berafiliasi untuk menyatukan misi dan visi *jihad* dalam satu wadah dan pada akhirnya dapat menerapkan model *jihad* beragam yang sesuai dengan lini masing-masing ormas yang dikenal dengan *tansiq* (aliansi). Bahkan diungkapkan oleh Shobbarin, syari'at Islam bukanlah mengesampingkan umat yang beragama lain, namun yang mengatur kehidupan mereka adalah syari'at Islam. Sebagaimana figur Rasulullah, beliau tidak membedakan ataupun memisahkan umat Islam dengan penganut agama lain, bahkan mereka dapat hidup berdampingan sebagai "*ahl al-Dzimmah*". Istilah tersebut yaitu masyarakat minoritas, yang mana dalam hal ini adalah Kristen dan Yahudi. Dalam kitab-kitab fiqh

mereka disebut sebagai *second class*. Mereka mempunyai hak untuk hidup, akan tetapi dalam ranah politik posisi mereka sangat terbatas.

- b. *Reaktif* bersifat spontan, terutama dalam menyikapi masalah ideologi lain yang bukan ideologi Islam. Dalam hal ini Nasionalisme misalnya, Nasionalisme merupakan sebuah ideologi tandingan yang harus dimusnahkan dan digantikan dengan ke-Islaman. Kenyataan ini dapat dilihat pada *stressing* MMI dalam menegakkan *syari'at Islam* dengan cara-cara yang spesifik.
- c. *Konfrontatif*, wacana, ide yang kerap kali memancing kemarahan dan memekakkan telinga, terutama penyikapan terhadap kaum kafir atau lebih jelas adalah Amerika Serikat dan Sekutunya, statementnya selalu menandakan *Jihad*, perang atas nama agama, *Li I'lai Kalimat Allah*, akan tetapi realisasinya masih sebatas perang wacana dan *sharing* ide, belum kearah fisik (perang). Sebab sekali lagi belum saatnya umat Islam mengangkat senjata, karena yang dilontarkan hanya sebatas perang wacana.³¹

Sebagaimana yang terlihat dalam pemaparan diatas, bahwasanya Majelis Mujahidin Indonesia lebih menekankan kepada sarana prasarana yang ada dalam sebuah lembaga-lembaga sosial untuk mendisiplinkan individu serta masyarakat. Tentunya dari usahanya yang dilakukan tidak

³¹ M. Aksan Muhladi, "Gerakan *Jihad* Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) 2000-2005", (Skripsi, IAIN Sunan Ampel, 2006), 60-61.

lain untuk mencapai sebuah misinya, yaitu membentuk sebuah kepribadian Islami, keluarga dan masyarakat Islam, yang sehingga pada akhirnya meyatukan umat Islam.³²

Dalam kehidupan sosial, Abu Bakar Ba'asyir membuat garis sekat dengan tegas untuk membedakan antara orang Islam yang baik dan orang kafir, antara orang Islam yang baik dan orang Islam yang kurang baik. Secara garis besar bagi Majelis Mujahidin Indonesia kekuatan iman seseorang diukur dari tingkat kebersamaannya dengan sesama muslim dan hanya memungkinkan interaksi minimal dengan non muslim.

³² Akademika, Jurnal, Vol. 16, No. 2, Maret 2005, Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, 2005, 131.